

Penguatan Ketertelusuran (*Traceability*) Komoditas Menghadapi EUDR, Kaoem Telapak Luncurkan Platform Pemantauan Kehutanan

Jakarta, 20 Maret 2025 - Hari ini Kaoem Telapak telah melaksanakan Lokakarya Nasional bertema "Traceability dalam Implementasi EUDR di Indonesia" sekaligus peluncuran aplikasi pemantauan yang dikembangkan oleh Kaoem Telapak bernama *Ground-truthed.id* (GTID). Lokakarya ini bertujuan diantaranya untuk meningkatkan kesiapan Indonesia terhadap regulasi EUDR dan mengidentifikasi peran masing-masing pihak, termasuk pemerintah, industri, Masyarakat Adat, dan organisasi non-pemerintah, dalam memastikan ketertelusuran komoditas yang bebas deforestasi. Dalam lokakarya ini, Kaoem Telapak mengundang berbagai pemangku kepentingan termasuk instansi pemerintah, perwakilan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas petani. Lokakarya inipun dibuka oleh sambutan **Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arif Havas Oegroseno**.

Berbagai pihak di Indonesia, termasuk pemerintah, sektor industri, dan organisasi masyarakat sipil, menghadapi tantangan dalam memastikan kesiapan Indonesia terhadap aturan deforestasi dan degradasi guna memenuhi tuntutan internasional, salah satunya adalah Regulasi Bebas Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation-free Regulation/EUDR). Regulasi ini bertujuan memperbaiki tata kelola komoditas kehutanan yang berkelanjutan. Indonesia, yang memiliki lima komoditas terdampak peraturan EUDR antara lain kayu, sawit, kakao, kopi, dan karet, telah mulai mengambil langkah-langkah strategis dalam mempersiapkan pemenuhan persyaratan regulasi tersebut.

Havas menekankan perlunya EUDR dibahas secara komprehensif. "Dalam pertemuan kita hari ini, EUDR harus dibahas keseluruhan, tidak bisa hanya dilihat dari satu aspek saja yang dibahas. Tetapi harus memproyeksikannya secara menyeluruh. Semua syaratnya harus diikuti." ungkapnya.

Salah satu elemen utama dalam regulasi EUDR adalah ketertelusuran (*traceability*), yaitu proses melacak asal usul komoditas yang dipasarkan di Uni Eropa untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak berasal dari deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi setelah 31 Desember 2020. Untuk memenuhi ketentuan ini, Indonesia perlu memastikan bahwa seluruh rantai pasok dapat memberikan informasi yang akurat dan transparan terkait asal-usul dan kepatuhan komoditas terhadap prinsip keberlanjutan.

Sander Happaerts, *Green and Digital Counsellor at EU Delegation to Indonesia, Brunei Darussalam and ASEAN*, menyatakan Ketertelusuran merupakan poin penting dalam EUDR, "Ketertelusuran merupakan aspek yang sangat penting dalam EUDR. Memang perspektif Ketertelusurannya datang dari perspektif negara konsumen. Konsumen ingin tahu produk yang mereka konsumsi berasal dari mana. Sambil bekerja dengan stakeholder di Indonesia, kami mendapatkan input yang baik, yang bisa diwujudkan dengan melibatkan smallholder dalam rantai pasok. EUDR adalah peraturan yang wajib diterapkan, tentu ada beberapa tantangannya, terutama perihal definisi, masa depan smallholders, akan tetapi kami akan terus menyelesaikan tantangan yang ada," ucap Sander.

Lebih lanjut, implementasi ketertelusuran masih menghadapi tantangan, seperti kesenjangan data dan kesiapan petani serta perusahaan dalam memenuhi standar traceability. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil guna membangun infrastruktur digital yang baik serta mekanisme verifikasi yang efektif.

Salah satu inisiatif pemerintah Indonesia dalam memastikan ketertelusuran komoditas agar mematuhi regulasi non deforestasi adalah dengan membangun sistem *National Dashboard*. National Dashboard adalah platform ketertelusuran (*traceability*) komoditas nasional yang mencakup pengumpulan dan manajemen data, pemetaan registrasi ketertelusuran petani dan pekebun.

“Pemerintah Indonesia menyiapkan dashboard ini untuk menghadapi regulasi global, yang saat ini mengelatkan ketertelusuran, dari semua komoditas yang diekspor. Dashboard ini menjadi solusi integrasi data terkait ketertelusuran. Konteksnya adalah *services* dan perlindungan terhadap data dan informasi semua komoditas yang diekspor,” ungkap **Ir. Diah. Y. Suradiredja**, sebagai Koordinator Nasional untuk Dashboard Nasional.

Pada lokakarya ini, Kaoem Telapak meluncurkan aplikasi pemantauan kehutanan berbasis web dan Android yang disebut dengan *Ground-truthed.id* (GTID). Aplikasi ini ditujukan untuk mengumpulkan dan menjadikan data hasil pemantauan kehutanan dan lingkungan seperti yang didapat dari kelompok masyarakat sipil, Masyarakat Adat dan komunitas lokal di Indonesia, untuk mendukung transparansi, akuntabilitas dan keadilan bagi hutan Indonesia.

Dengan mensinergikan penggunaan aplikasi GTID dengan kegiatan advokasi lingkungan, GTID diharapkan dapat memperkuat upaya-upaya advokasi yang dilakukan oleh para pihak dalam melawan pembalakan liar, penggundulan hutan, perampasan lahan dan ketidakadilan lingkungan.

Senior Campaigner Kaoem Telapak, **Denny Bhatara**, mengungkapkan, Kaoem Telapak memiliki jaringan pemantauan yang cukup luas untuk menyuarakan kerusakan hutan dan lingkungan yang terjadi di tingkat tapak. “Sebagai alat pelengkap untuk monitoring kehutanan, aplikasi ini menekankan pada konteks dokumentasi berbasis geo lokasi. Selain menyampaikan kondisi tingkat tapak, pemakaian aplikasi ini untuk mendorong akuntabilitas,” jelas Denny.

“Kami berharap aplikasi ini dapat dikolaborasikan sebagai wadah bagi pemantau untuk menunjukkan bagaimana Indonesia bekerja di lapangan serta memberikan gambaran nyata tentang kondisi di tanah kita. Kaoem Telapak bangga memiliki platform ini dan terbuka untuk kolaborasi dalam memperkaya serta mengoptimalkan penggunaannya,” ucap Presiden Kaoem Telapak, **Mardi Minangsari**.

– Selesai –

Olvy Tumbelaka, Senior Campaigner Kaoem Telapak | 0812-3550-0553 |
Olvy.tumbelaka@kaoemtelapak.org

Denny Bhatara, Senior Campaigner Kaoem Telapak | denny.bhatara@kaoemtelapak.org

Sarah R Megumi, Senior Communitcation Kaoem Telapak | 0819 - 0811-0300 |
sarah.megumi@kaoemtelapak.org